

LAPORAN

HASIL RISET PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2015

“Karakteristik *Money Politic* Pada Pemilu dan Pilkada di Kota Batu”



KERJASAMA
KPU KOTA BATU
dengan

PT. KUALITA PRIMA INDONESIA



PT. KUALITA PRIMA INDONESIA

LAPORAN

HASIL RISET PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2015

**“Karakteristik *Money Politic* Pada Pemilu dan
Pilkada di Kota Batu”**

KERJASAMA

KPU KOTA BATU

dengan

PT. KUALITA PRIMA INDONESIA



PT. KUALITA PRIMA INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME karena berkat rahmat-Nya pelaksanaan riset partisipasi masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Latar belakang pelaksanaan Riset Parmas karena tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) yang fluktuatif pada pemilu, bahkan sejak awal reformasi pelaksanaan Pemilu cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu sebelum Tahun 2014 disamping itu pelaksanaan pemilu juga dicemari dengan kualitas partisipasi itu sendiri, mulai dari persoalan *money politic*, tingkat kesukarelaan warga dalam berpolitik, tingkat melek politik dan ketidakhadiran masyarakat dalam setiap pemilu.

Dalam pemilu 2014 KPU Kota Batu berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, akan tetapi usaha yang dilakukan dari mulai sosialisasi media elektronik, media sosial tatap muka ke berbagai elemen masyarakat lewat Relawan Demokrasi, ternyata masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini bisa kita bandingkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2009 dan 2014.

Berawal dari persoalan partisipasi itulah KPU Kota Batu berusaha untuk mencari akar masalah tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Lewat Riset Partisipasi masyarakat ini diharapkan mampu Mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilu dan bisa dijadikan bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu dan setelahnya. Disamping itu tujuan riset diharapkan dapat menemukan akar

masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu bisa dan terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu.

Demikian pengantar ini disampaikan diharapkan hasil riset yang telah dilaksanakan dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan program-program yang dapat digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan datang.

KPU KOTA BATU
Ketua,

Rochani, S.Pi, MP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
1. PENDAHULUAN	2
2. TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM	3
3. RUANG LINGKUP SURVEI	3
Metode Survei	3
4. TEKNIS PELAKSANAAN SURVEI	4
5. HASIL SURVEI	6
5.1. Karakteristik Demografi Responden	6
5.2. Pelaksanaan Pemilihan Langsung	12
5.3. Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	16
6. REKOMENDASI HASIL SURVEI	23
7. PENUTUP	25
8. LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAPORAN HASIL SURVEI

KARAKTERISTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILU DAN PILKADA DI KOTA BATU TAHUN 2015

1. PENDAHULUAN

Secara ilmiah dan empiris, dinamika politik dalam sebuah Negara demokrasi selalu dipengaruhi oleh pergeseran kesadaran masyarakat dalam memilih sebuah lembaga (partai politik) dan figure seorang pemimpin yang mereka percayai akan dapat memberikan jaminan perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya (saat ini). Pergeseran kesadaran politik tersebut disebabkan oleh 2 hal, yaitu terjadi secara alamiah dan terjadi karena adanya intervensi secara sistematis.

Pergeseran kesadaran politik yang terjadi secara alamiah memerlukan waktu yang tidak sebentar. Menurut beberapa intelektual dan pengamat, bahwa siklus dalam politik akan terjadi dalam kurun waktu antara 20 – 25 tahun. Sedangkan pergeseran kesadaran politik masyarakat yang disebabkan adanya intervensi secara sistematis akan dapat terjadi dalam kurun waktu 5 – 10 tahun, dan tentunya membutuhkan energi politik yang cukup besar.

Dalam perkembangan dinamika politik Negara demokrasi kontemporer, pergeseran (pergerakan) kecenderungan pemilih dalam sebuah momentum politik (Pileg, Pilpres dan Pilkada) dapat diketahui

dan dideteksi dengan menggunakan alat ukur riset atau “survei”. Dengan alat ukur riset atau survei, kita tidak hanya sekedar dapat memberikan rasionalisasi akademik atas substansi perilaku pemilih dalam Pemilu dan Pilkada, tetapi lebih menambah bobot (pijakan) empirik mengenai persoalan pergeseran perilaku pemilih pada setiap momentum Pemilu dan Pilkada.

Riset tidak hanya menjadi kebutuhan lembaga politik (seperti parpol) dan calon kepala daerah, tetapi juga sangat penting dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam rangka membangun manajemen pemilu yang efektif dan akuntabel. Dinamika perilaku pemilih di masyarakat dapat dijadikan landasan argumentasi empirik dan rasional dalam membuat kebijakan pengelolaan (menajemen) Pemilu dan Pilkada untuk periode yang akan datang.

Oleh karena itu dalam rangka mengetahui karakteristik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Kota Batu, dan untuk mengetahui harapan masyarakat atas perbaikan kualitas pelaksanaan Pemilu atau Pilkada ke depan. Maka kami dari PT. Kualita Prima Indonesia bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu melaksanakan riset atau survei tentang karakteristik (perilaku) politik uang dalam Pemilu dan Pilkada guna menjawab kesesuaian antara harapan dan kenyataan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Kota Batu yang akan datang.

2. TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM

Tujuan umum pelaksanaan survei Karakteristik Politik Uang Dalam Pemilu dan Pilkada Kota Batu antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penilaian (kepuasan) masyarakat atas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
- 2) Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang baik dan bersih;
- 3) Untuk mengetahui persepsi dan harapan masyarakat terhadap kualitas dan perbaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang akan datang di Kota Batu;
- 4) Untuk mengetahui persepsi dan harapan masyarakat terhadap praktek Politik Uang (*money politic*) dalam Pemilu atau Pilkada, khususnya di Kota Batu;
- 5) Untuk mengetahui bagaimana pola praktek politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Kota Batu;
- 6) Hasil survei dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengatasi fenomena politik uang tersebut.

3. RUANG LINGKUP SURVEI

a. Metode Survei

Ruang lingkup program survei ini adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada selama 5 tahun terakhir, serta untuk mengetahui bagaimana persepsi dan harapan masyarakat Kota Batu terkait dengan praktek politik uang dalam Pemilu atau Pilkada.

Survei ini kami laksanakan pada bulan Juni – Juli tahun 2015. Teknik pengambilan sample menggunakan metode *Multistage Sampling* dengan mempertimbangkan jumlah populasi penduduk

dan gender pada setiap Desa/Kelurahan yang telah diketahui jumlahnya (terhingga). Sedangkan metode pengumpulan data dan informasi adalah melalui wawancara langsung (*face to face interview*) dan pengamatan (analisis) yang dilaksanakan oleh surveior (tim lapangan).

Sumber informasi (responden) yang kami survei adalah sebanyak \pm 190 – 200 orang. Jumlah responden (survei) tersebut tersebar di 3 Kecamatan dan 24 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kota Batu dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	RESPONDEN		JUMLAH
		L	P	
1	Batu	36	36	72
2	Bumiaji	35	34	69
3	Junrejo	26	31	57
	JUMLAH	97	101	198

b. Teknis Pelaksanaan Survei

Survei Karakteristik Politik Uang Dalam Pemilu dan Pilkada Kota Batu dilaksanakan oleh PT. Kualita Prima Indonesia dengan susunan tim manajemen yang terdiri dari seorang manager tim dan 2 (dua) orang tenaga ahli.

Dalam pelaksanaan survei, manajemen tim tersebut dibantu oleh supervisor yang bertugas melakukan breafing (sebelum pelaksanaan survei) dan pengawasan terhadap surveyor yang

bertugas melakukan wawancara atau menggali informasi dari responden di lapangan.

Disamping itu, tugas supervisor adalah melakukan verifikasi data hasil wawancara surveior terhadap responden di lapangan. Apabila dalam proses verifikasi tersebut terdapat kesalahan data atau kesalahan pengisian kuisisioner, maka data tersebut akan dikembalikan kepada surveior agar dilakukan pembetulan atau survei ulang dalam rangka mendapatkan data (informasi) yang benar. Akan tetapi, apabila dalam proses verifikasi tersebut tidak terdapat kesalahan data dan pengisian kuisisioner telah dilaksanakan secara benar, maka data tersebut akan dimasukkan kepada tim manajemen untuk dilakukan analisis data dan selanjutnya dirumuskan menjadi hasil riset atau survei.

Untuk menjaga obyektivitas informasi yang dibutuhkan dalam program survei ini, maka dalam menentukan responden (sumber informasi) ini kami batasi dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Responden harus warga asli dan bertempat tinggal di Kota Batu minimal 6 (enam) bulan;
2. Telah berusia minimal 17 tahun, dan atau sudah terdaftar menjadi pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2014;
3. Tidak memiliki anggota keluarga yang bekerja di Perusahaan Riset, Perusahaan Periklanan, Perusahaan Media Massa, dan pengurus Partai Politik tertentu.

5. HASIL SURVEI

Dalam proses analisis data survei, kami melakukan pemilahan data survei (dari kuisisioner) menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Karakteristik Demografi, Pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, dan Politik Uang. Pemilahan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses analisis data dan agar hasil survei tetap fokus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya riset atau survei ini.

Sedangkan uraian dari pemilahan data survei Karakteristik Politik Uang Dalam Pemilu atau Pilkada adalah sebagai berikut:

5.1. Karakteristik Demografi Responden

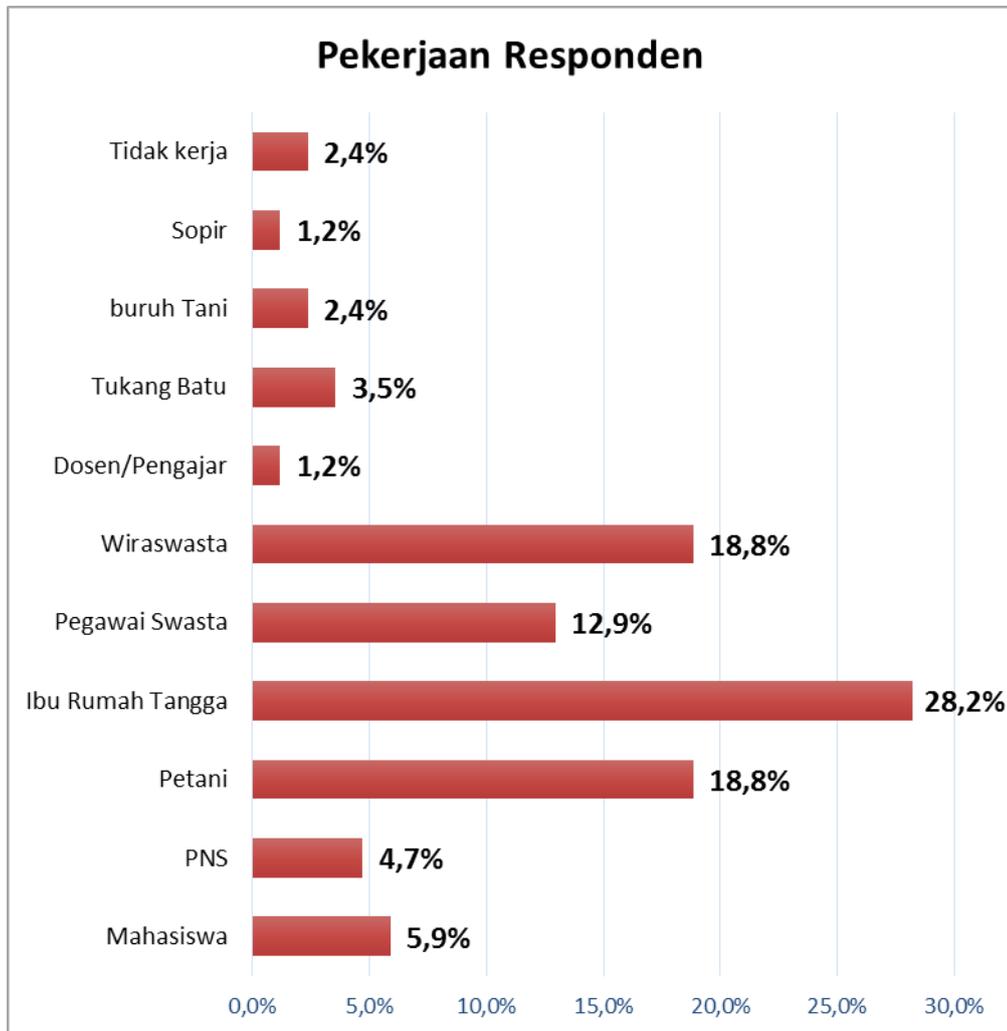
Karakteristik demografi dalam pelaksanaan riset atau survei ini menerangkan identitas responden dalam beberapa aspek, yaitu pekerjaan, usia, jenjang pendidikan terakhir, kedudukan dalam keluarga, jumlah pemilih dalam keluarga, pengeluaran rutin setiap bulan (untuk memenuhi kebutuhan keluarga) dan persoalan peningkatan kesejahteraan.

Identitas responden tersebut diatas (terutama dari segi usia, jenjang pendidikan dan pekerjaan) biasanya akan mempengaruhi cara pandang dan penilaian seorang responden terhadap suatu persoalan yang sedang menjadi fokus dalam sebuah penelitian, terutama terkait dengan penelitian atau riset tentang praktek (pengalaman) berdemokrasi dalam Pemilu atau Pilkada.

Pekerjaan responden dalam survei ini mayoritas adalah ibu rumah tangga (sebesar 28,2 %), wiraswasta (sebesar 18,8 %), petani (sebesar 18,8 %), pegawai swasta, mahasiswa, PNS,

tukang batu, buruh tani, dan sopir. Sedangkan responden yang tidak bekerja sebanyak 2,4 %.

Tabel 5.1.1

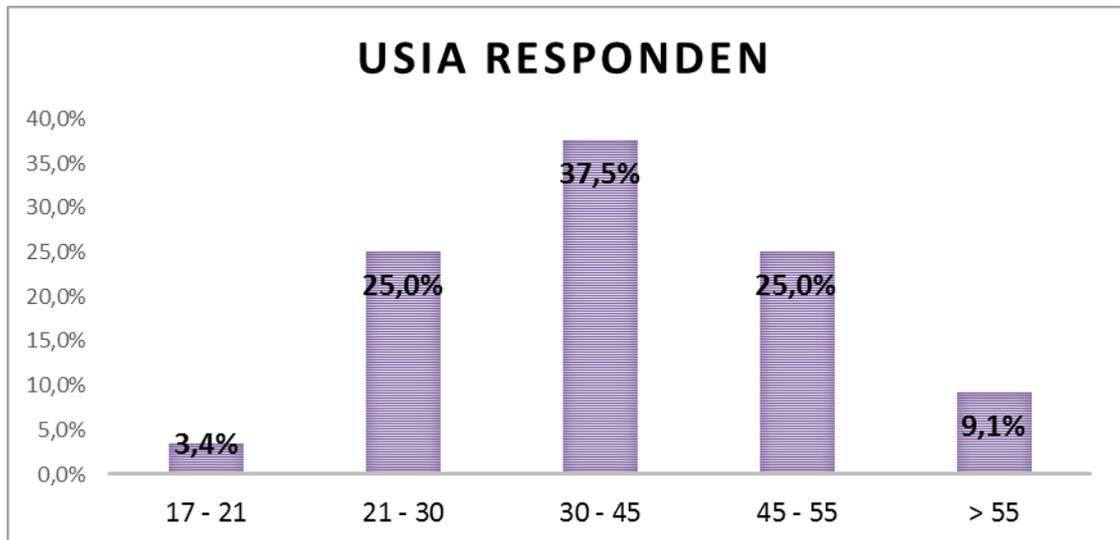


Dari segi usia, rata-rata usia responden antara 21 – 55 tahun (sebanyak 87,5 %), usia diatas 55 tahun (sebanyak 9,1%), dan usia 17 – 20 tahun (dibawah 21 tahun sebanyak 3,4 %).

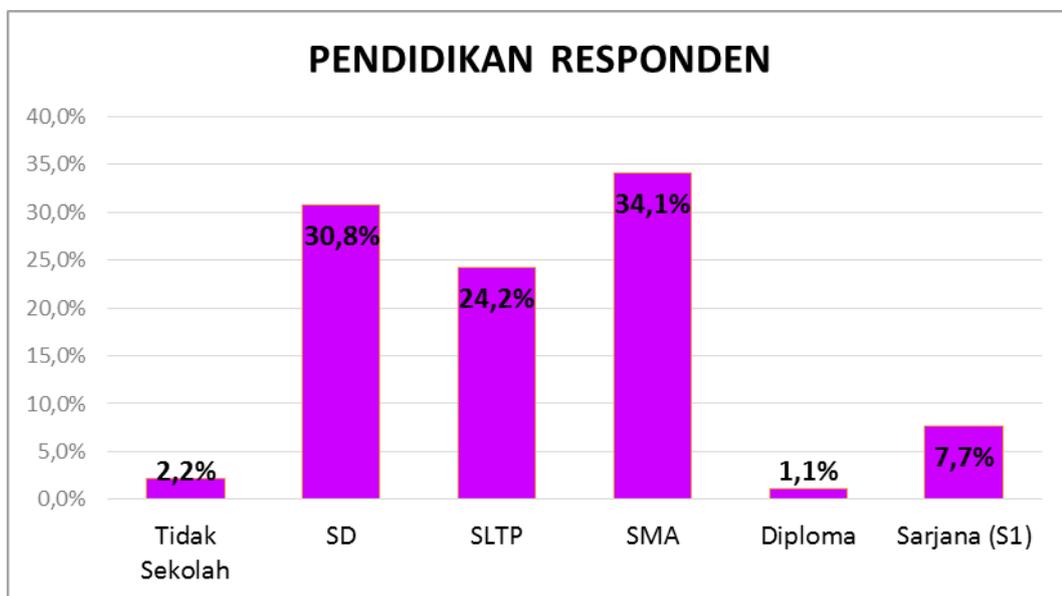
Sedangkan jenjang pendidikan responden rata-rata adalah Sekolah Menengah Atas (sebanyak 34,1 %), Sekolah Dasar (sebanyak 30,8 %), Sekolah Menengah Pertama (24,2 %), Sarjana

S1 (sebanyak 7,7 %), jenjang Diploma dan tidak sekolah masing-masing dibawah 3 %.

Tabel 5.1.2



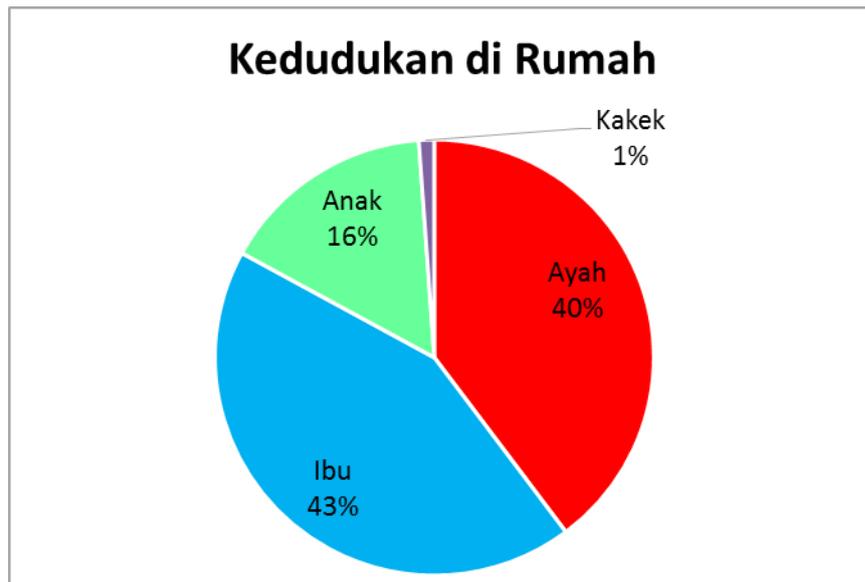
Tabel 5.1.3



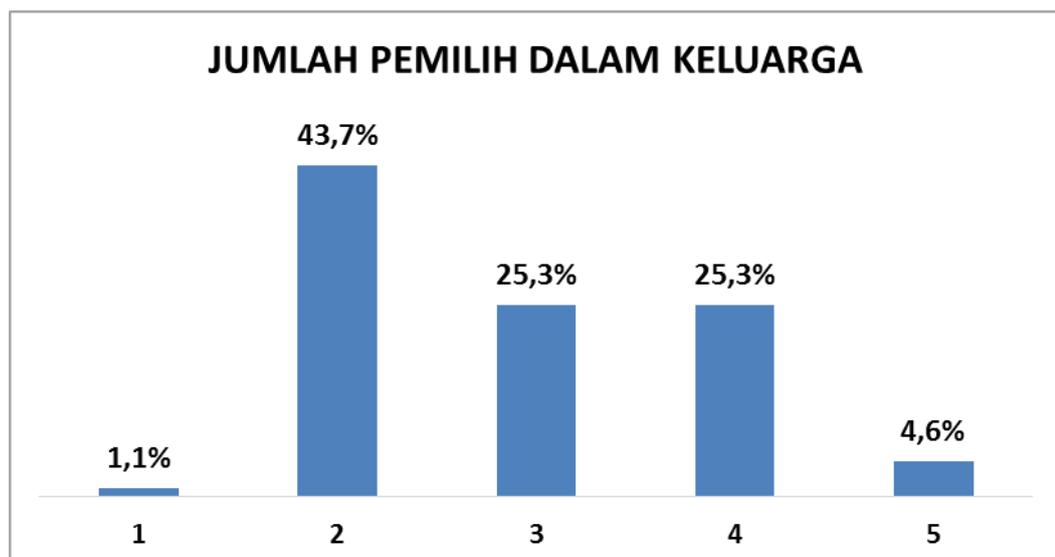
Kedudukan responden dalam keluarga adalah sebagai Ibu (43 %), sebagai Ayah (40%), sebagai Anak (16 %) dan sebagai Kakek hanya sebanyak 1 %. Sedangkan jumlah pemilih dalam keluarga responden adalah rata-rata 2 orang pemilih (43,7 %),

jumlah 3 orang pemilih (25,3 %), jumlah 4 orang pemilih (25,3%), jumlah 5 orang pemilih (4,6 %), dan berjumlah 1 orang pemilih sebanyak 1,1 % dari responden yang telah diwawancarai. Selanjutnya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 5.1.4

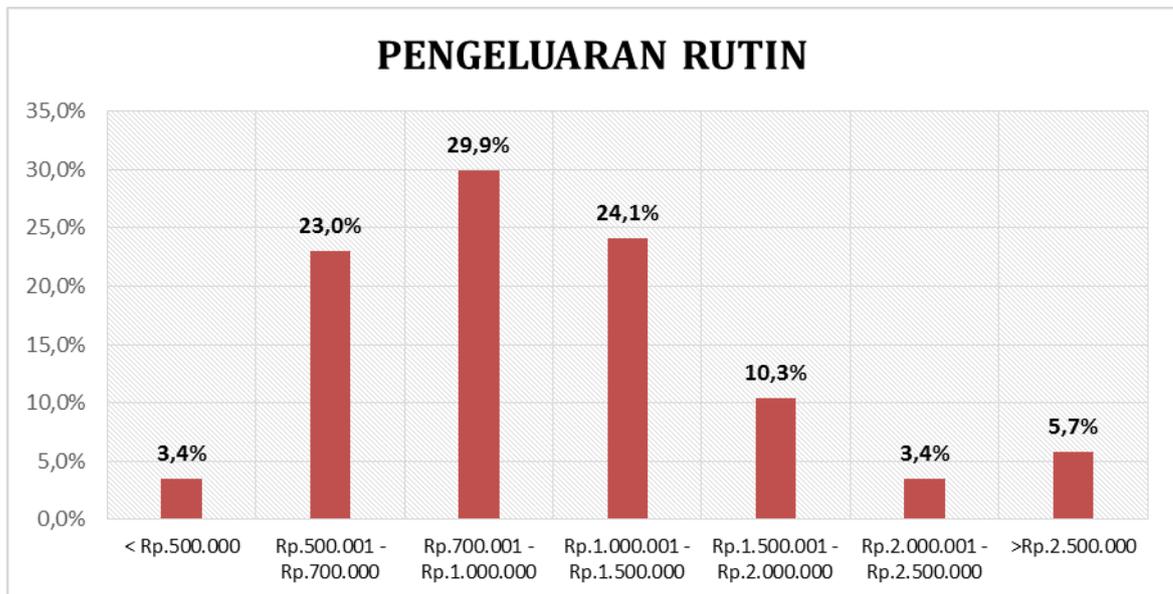


Tabel 5.1.5



Pengeluaran rutin setiap bulan responden adalah rata-rata Rp. 700.001 – Rp. 1000.000 (sebanyak 29,9 %), pengeluaran rutin Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000 (sebanyak 24,1 %), pengeluaran rutin Rp. 500.001 – Rp. 700.000 (sebanyak 23 %), pengeluaran rutin Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 (sebanyak 10,3 %), pengeluaran rutin diatas Rp. 2.500.000 (sebanyak 5,7%), pengeluaran rutin Rp. 2.000.001 – Rp. 2.500.000 (sebanyak 3,4 %), dan pengeluaran rutin dibawah Rp. 500.000 sebanyak 3,4 %.

Tabel 5.1.6

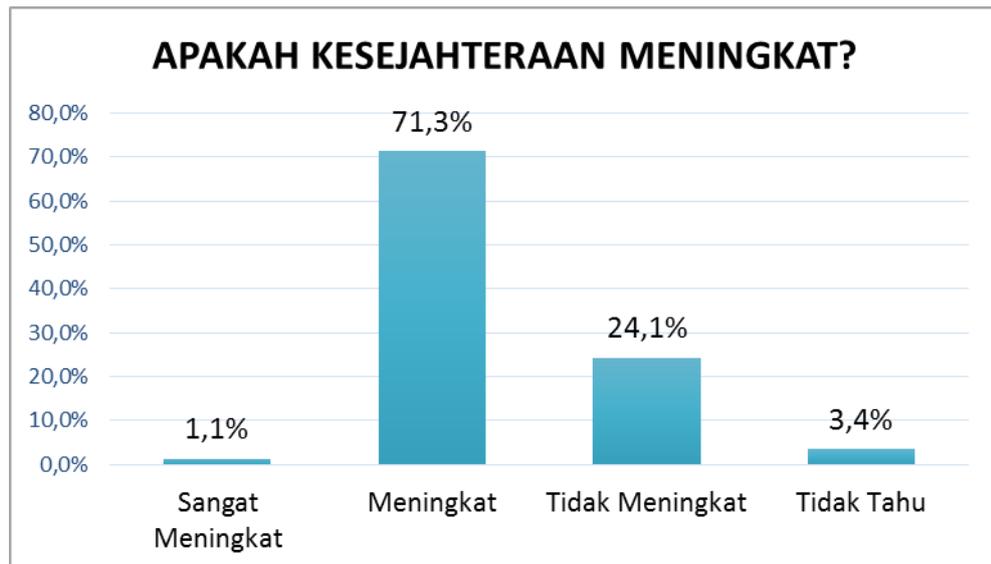


Mayoritas masyarakat Kota Batu menyatakan kesejahteraannya saat ini mengalami peningkatan (sebanyak 71,3%), menyatakan tidak ada peningkatan kesejahteraan (sebanyak 24,1%), menjawab tidak tahu sebanyak 3,4% responden, dan hanya 1,1% responden menjawab sangat meningkat kesejahteraannya.

Disamping itu, secara umum masyarakat juga memiliki optimisme dan keyakinan yang cukup tinggi terkait dengan

peningkatan kesejahteraannya di masa yang akan datang, yaitu 72% masyarakat yakin, sebanyak 23% responden menjawab tidak tahu, dan sebanyak 5% masyarakat yang tidak yakin akan peningkatan kesejahteraannya dimasa yang akan datang.

Tabel 5.1.7



Tabel 5.1.8

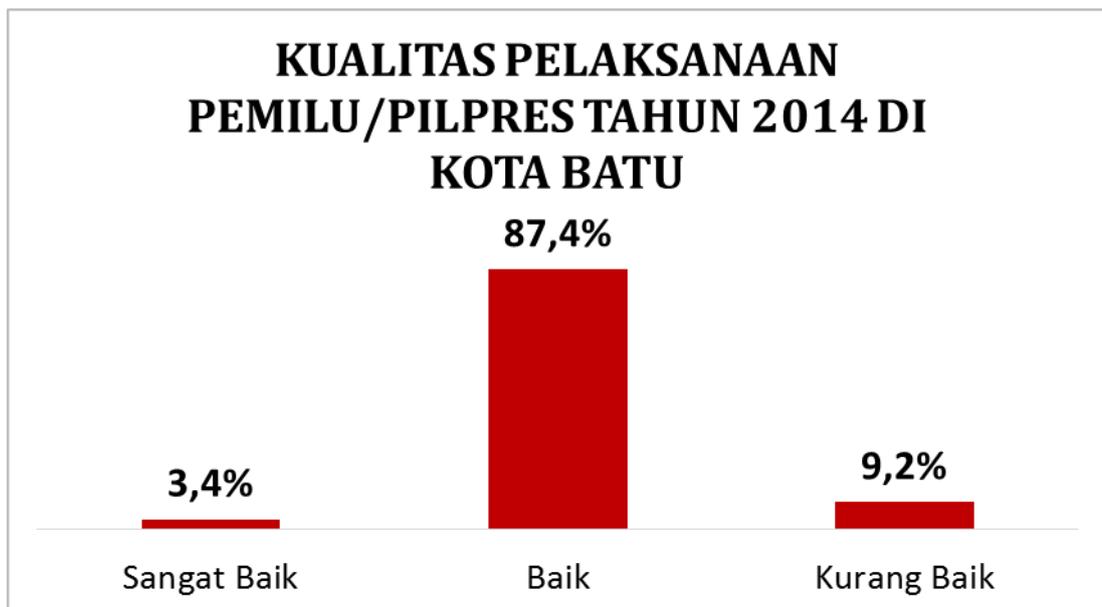


5.2. Pelaksanaan Pemilihan Langsung

Informasi tentang pelaksanaan Pemilu dalam riset ini lebih difokuskan pada persepsi dan penilaian masyarakat tentang kualitas pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam riset ini adalah kualitas pelaksanaan, media informasi, dan masukan atau harapan masyarakat terkait dengan perbaikan kualitas Pemilu atau Pilkada di Kota Batu.

Kualitas pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 menurut masyarakat sudah cukup baik (sebanyak 87,4%), masyarakat yang memberi penilaian kurang baik (sebanyak 9,2%), sedangkan yang berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden sangat baik hanya sebanyak 3,4% responden. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2.1.

Tabel 5.2.1

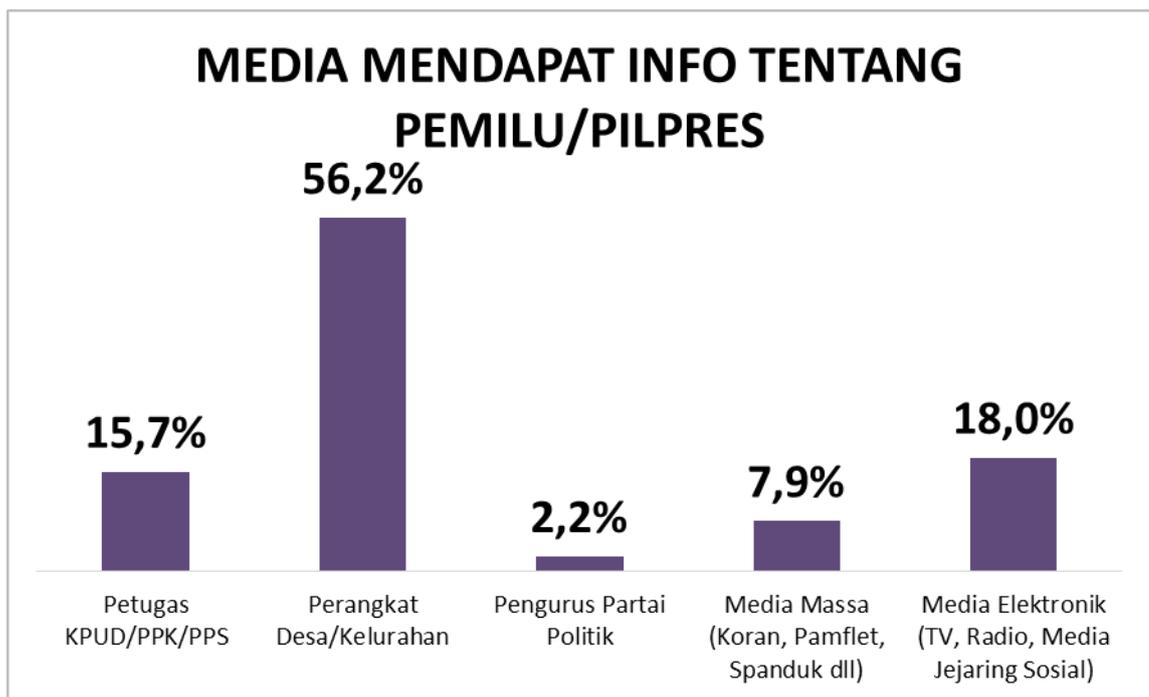


Alasan masyarakat dalam memberikan penilaian (baik/sangat baik/kurang baik) terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 cukup beragam karena setiap responden memiliki pengalaman yang berbeda. Masyarakat yang berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilihan Langsung sudah Baik/Sangat Baik menyampaikan beberapa argumentasi empiris, anatara lain: pelaksanaan Pemilihan Langsung berjalan aman dan lancar, berjalan dengan tertib, panitia (penyelenggara) baik dan ramah, jumlah masyarakat yang *golput* berkurang, penghitungan suara dilaksanakan lebih cepat, jumlah TPS bertambah banyak, dan tidak ada (minim) kecurangan. Sedangkan masyarakat yang berpendapat bahwa kualitas pelaksanaan Pemilihan Langsung Kurang Baik beralasan bahwa masih banyak terjadi kecurangan dan kurang maksimalnya sosialisasi di wilayahnya.

Alasan menilai kualitas pelaksanaan Pemilihan Langsung	
BAIK/SANGAT BAIK	KURANG BAIK
Aman dan Lancar Tertib Panitia Baik dan Ramah Golput Berkurang Perhitungan Cepat Jumlah TPS banyak Tidak Ada Kecurangan	Banyak Kecurangan Kurang Sosialisasi

Media sumber informasi masyarakat terkait pelaksanaan Pemilihan Langsung sangat beragam, sumber informasi ini dapat dijadikan acuan oleh Penyelenggara Pemilu agar proses sosialisasi dapat berjalan secara optimal dan efektif. Media yang dijadikan sumber informasi masyarakat adalah Perangkat Desa/Kelurahan (sebanyak 56,2%), media elektronik (TV, radio dan jejaring sosial sebanyak 18%), penyelenggara atau petugas Pemilu (KPU, PPK dan PPS sebanyak 15,7%), media massa (Koran, pamflet, spanduk dll sebanyak 7,9%) dan pengurus Partai Politik hanya sebanyak 2,2% responden.

Tabel 5.2.2



Terdapat banyak masukan (pendapat) masyarakat terkait dengan perbaikan pelaksanaan Pemilihan Langsung di Kota Batu. Indeks Persepsi Masyarakat dalam rangka perbaikan pelaksanaan Pemilihan Langsung antara lain : sosialisasi agar lebih di intensifkan, pendaftaran dipermudah, pelaksanaan pemilihan

langsung harus lebih transparan, pengawasan terhadap atas kecurangan pemilu dan politik uang agar lebih diperketat, kualitas panitia (penyelenggara) ditingkat bawah perlu ditingkatkan, politik uang perlu dihilangkan, dan pendataan warga agar dilakukan secara merata.

Tabel 5.2.3

NO	MASUKAN PERBAIKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG	PROSENTASE
1	Sosialisasi ditambah (lebih intensif)	38.9%
2	Dipermudah pendaftaran	24.4%
3	Harus lebih terbuka	18.1%
4	Pengawasan diperketat	7.8%
5	Peningkatan kualitas panitia	5.7%
6	Politik uang dihilangkan	3.1%
7	Pendataan warga harus merata	1.6%
8	Lainnya	0.5%
TOTAL		100.0%

5.3. Politik Uang (*Money Politic*)

Fenomena politik uang (*money politic*) dalam pemilihan langsung semakin tidak terbendung dan terjadi pada seluruh tahapan pemilihan langsung yang berjalan di negeri ini, mulai dari Pilkada sampai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, bahkan juga terjadi di Pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, tujuan mencari seorang pemimpin yang baik dan berkualitas dalam Pemilihan Langsung secara faktual terdistorsi oleh maraknya praktek politik uang yang terjadi saat ini.

Implikasi dari praktek politik uang menjadikan sebagian besar masyarakat bersikap pragmatis dalam Pemilu atau Pilkada, hanya dengan mendapatkan uang saku (yang mungkin jumlahnya tidak besar) seseorang dipilih menjadi pemimpin tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kualitas dan integritas calon pemimpin tersebut.

Masyarakat sebenarnya juga berada pada posisi yang delematis, disatu sisi masyarakat sangat paham jika praktek politik uang adalah masuk kategori pelanggaran dalam pemilu, tetapi disisi lain dorongan adanya praktek politik uang tersebut muncul dari orang-orang disekitarnya secara massif pada setiap momentum Pemilu atau Pilkada. Dari hasil riset (survei) menunjukkan **61% masyarakat Tidak Setuju** dengan politik uang, sedangkan **39% responden menyatakan Setuju** dengan praktek politik uang.

Tabel 5.3.1



Pada dasarnya politik uang merupakan transaksi bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun apabila tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan. Mayoritas responden berpendapat bahwa untuk mendapatkan dukungan tidak serta merta harus dengan praktek politik uang (sebanyak 88%) dan hanya 2% responden yang menyatakan perlunya politik uang untuk mendapatkan dukungan pada Pemilu atau Pilkada.



Masyarakat yang tidak setuju dengan praktek politik uang (61%) punya kecenderungan akan tetap menerima jika ada praktek politik uang momentum Pemilu atau Pilkada, dari jumlah tersebut sebanyak 34% mendapatkan atau menerima politik uang dan 66% tidak menerima politik uang pada Pemilu kemarin.

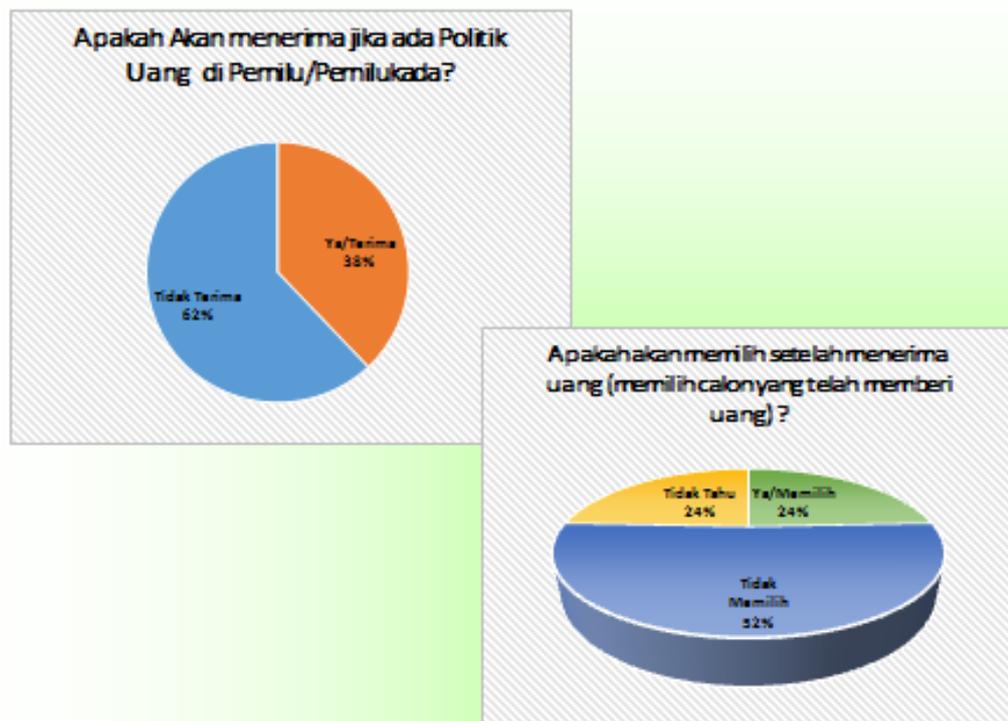
Sedangkan sejumlah 39% responden yang setuju dengan praktek politik uang juga tidak semuanya menerima pada saat Pemilu atau Pilkada yang lalu, sebanyak 44% mereka mendapatkan atau menerima politik uang, sedangkan sebanyak 56% tidak menerima politik uang.

Tabel 5.3.2



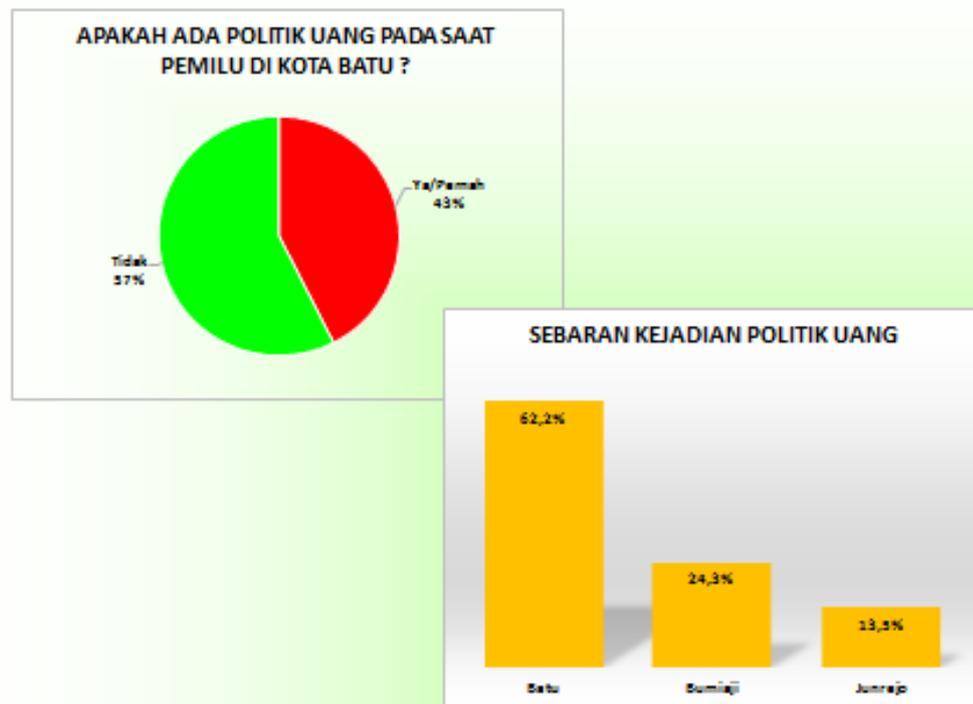
Sifat dinamis masyarakat cenderung mengarah pada sikap realistis (menguntungkan), tetapi mereka sebagian besar juga tetap mempertahankan idealism sesuai dengan suara hati nuraninya masing-masing. Artinya sebagian besar masyarakat akan menerima jika ada politik uang, tetapi juga tetap tidak memilih (caleg/calon kepala daerah) yang telah memberi uang tersebut. Sehingga seorang Caleg atau Calon Kepala Daerah hendaknya harus memiliki perhitungan yang lebih matang dan lebih selektif dalam melakukan rekrutmen relawan, karena mayoritas masyarakat yang diam (tidak terlibat aktif pada kegiatan politik) cenderung akan tetap memilih orang yang dikenalnya dan tidak serta merta akan mengalihkan dukungan hanya karena adanya praktek politik uang.

Tabel 5.3.3



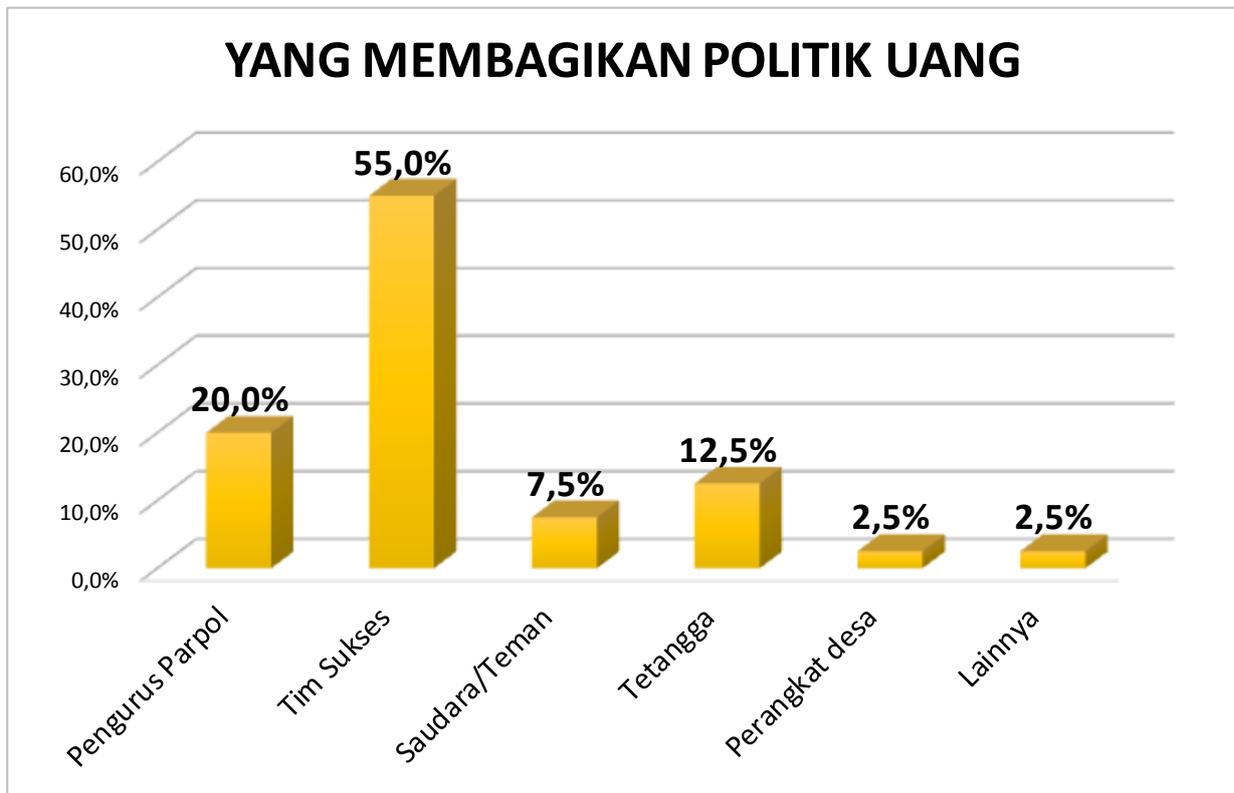
Volume dan sebaran praktek politik uang di Kota Batu terjadi secara menyeluruh di seluruh Kecamatan, sebanyak 43% responden menerima politik uang dan 57% responden tidak menerima politik uang pada Pemilu yang lalu. Sedangkan sebaran politik uang terjadi di Kecamatan Batu (sebanyak 62,2%), Kecamatan Bumiaji (sebanyak 24%) dan di Kecamatan Junrejo (sebanyak 13,5%).

Tabel 5.3.4



Dorongan terjadinya politik uang sebenarnya tidak murni dari masyarakat tingkat bawah secara pribadi, tetapi dorongan tersebut biasanya muncul dari kalangan masyarakat kelas menengah yang punya kecenderungan aktif dibidang politik (pengurus parpol), saudara atau tetangga yang menjadi tim sukses kandidat/caleg.

Tabel 5.3.5

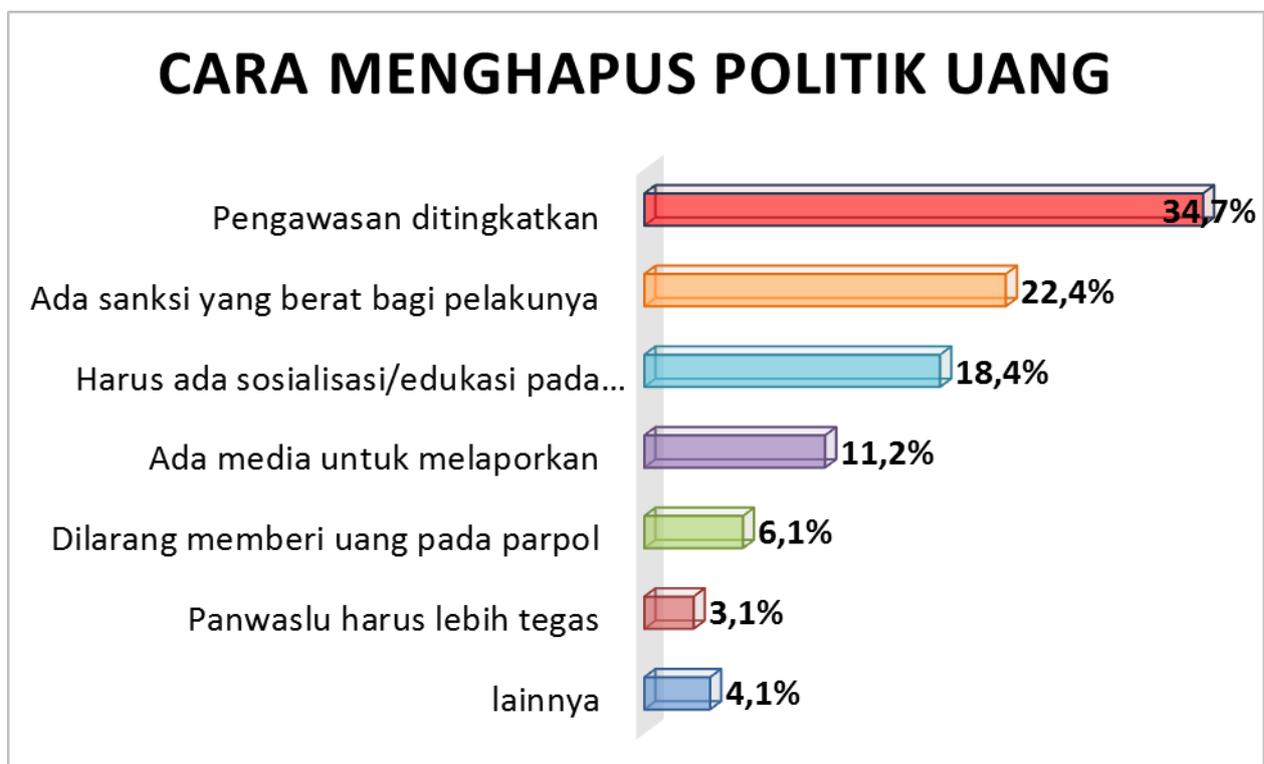


Secara prinsip mayoritas masyarakat sangat sadar bahwa praktek politik uang adalah perilaku yang dapat mencedraikan kemajuan dan perkembangan demokrasi di Indonesia, hal tersebut juga merupakan sikap yang masuk kategori pelanggaran Pemilu atau Pilkada (walaupun mereka tetap akan menerima jika ada politik uang). Idealisme dan sikap tersebut dapat dilihat dari pendapat masyarakat yang mayoritas setuju jika praktek politik uang pada Pemilu atau Pilkada DILARANG (sebanyak 80% responden), sebanyak 15% tidak setuju jika praktek politik uang dilarang, dan hanya 5% responden yang menjawab tidak tahu.

Tabel 5.3.6



Tabel 5.3.7



6. REKOMENDASI HASIL SURVEI

Dari data table dan uraian hasil survei tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas (87,4% responden) menilai bahwa kualitas pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 sudah berjalan BAIK, walaupun masih ada masyarakat yang kurang puas (kurang baik 9,2%).

Dalam konteks praktek politik uang pada Pemilu atau Pilkada, mayoritas masyarakat (61% responden) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 39% responden menyatakan setuju dengan praktek politik uang tersebut. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian khusus adalah mayoritas masyarakat (88% responden) juga menyatakan bahwa politik uang tidak diperlukan untuk mendapat dukungan publik pada Pemilu atau Pilkada. Hal ini juga didukung oleh data bahwa hanya 24% responden yang menyatakan akan memilih caleg atau kandidat yang membagikan politik uang pada Pemilu atau Pilkada, sedangkan sebanyak 52% responden menyatakan tidak akan memilih, dan sebanyak 24% responden menyatakan tidak tahu atau masih ragu.

Kesimpulan lainnya dari hasil riset atau survei ini adalah bahwa mayoritas masyarakat (80% responden) setuju jika praktek politik uang pada Pemilu atau Pilkada dilarang dan hanya 15% responden yang menyatakan tidak setuju.

Dari uraian hasil survei tersebut diatas, beberapa ide atau pendapat masyarakat tentang perbaikan kualitas Pemilu atau Pilkada dan pentingnya larangan terhadap praktek politik uang pada Pemilu atau Pilkada dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pentingnya sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat terkait teknis pelaksanaan Pemilu atau Pilkada dan dampak negatif atau larangan adanya praktek politik uang di masyarakat.
2. Perlu adanya pelatihan khusus (bimtek) kepada penyelenggara pemilu ditingkat bawah untuk peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaran Pemilu atau Pilkada di masa yang akan datang.
3. Pendataan warga untuk Daftar Pemilih Tetap perlu dilakukan secara lebih massif dan terbuka.
4. Pengawasan tentang praktek politik uang di masyarakat harus lebih diperketat. Hendaknya membangun kerjasama dengan stakeholder (khususnya perangkat Desa/Kelurahan) untuk melakukan pencegahan lebih awal atas kemungkinan terjadinya paktek politik uang.
5. Lembaga Pengawas Pemilu hendaknya dapat memberi sanksi yang lebih tegas dan lebih berat kepada pelaku politik uang pada Pemilu atau Pilkada.
6. Perlu ada media khusus dan kemudahan bagi masyarakat yang mau melaporkan adanya praktek politik uang.
7. Perlu adanya kerjasama antara Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu dengan membuat aturan bersama untuk memperketat pengawasan dan mempermudah pemberian sanksi terhadap pelaku praktek politik uang pada Pemilu atau Pilkada yang akan datang.

7. PENUTUP

Demikian laporan hasil riset atau survei Karakteristik Politik Uang Dalam Pemilu dan Pilkada Kota Batu ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 155/KPU/IV/2015 tanggal 6 April 2015
2. Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 2/UND/IV/2015 tanggal 25 Mei 2015
3. Surat Ketua KPU Kota Batu Nomor : 270/12/KPU Kota-014.329951/VIII/2015
tanggal 3 Agustus 2015
4. Dokumentasi Kegiatan
 - a. Rapat pleno kegiatan parmas kpu kota batubulan mei 2015
 - b. Pengambilan sample riset tingkat partisipasi masyarakat
 - c. Diseminasi hasil riset tingkat partisipasi masyarakat bersamapimpinan parpol,
media massa, lembaga survey dan kpu kota batu
 - d. Liputan media televisi lokal Kota Batu, "Agropolitan Televisi (atv)"
5. Kliping Publikasi Hasil Riset Melalui Media Cetak



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 6 April 2015

Nomor : 155/KPU/IV/2015
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu.

Kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi /KIP Aceh
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Bersama ini disampaikan bahwa KPU akan melaksanakan kegiatan Riset tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di tingkat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Hasil riset tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang efektif pada pemilu selanjutnya. Diharapkan dengan kegiatan riset ini dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

PEDOMAN RISET TENTANG PARTISIPASI DALAM PEMILU

A. Pendahuluan

Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu. Riset lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan kepemiluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Ia adalah fondasi praktik demokrasi perwakilan. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah menyangkut partisipasi pemilih yang terus menggelayut dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sayangnya, persoalan itu tidak banyak diungkap dan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan.

Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkanya kesukarelaan politik.

Masalah tersebut perlu didedah sedemikian rupa untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan keluarnya. Harapannya, partisipasi dalam pemilu berada pada idealitas yang diimajinasikan. Oleh karena itu, program riset menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan dalam manajemen pemilu.

B. Tujuan

1. Umum:
 - a. Mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilu.
 - b. Bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu dan setelahnya
2. Khusus:
 - a. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu
 - b. Terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu

C. Potensi Tema Riset

Terdapat sejumlah persoalan ditemukan dari setiap periode pemilu. Potret persoalan itu dilihat dalam rentang waktu pemilu-pemilu pada masa reformasi sampai dengan saat ini. Persoalan-persoalan yang dapat dijadikan tema potensial untuk diriset menyangkut partisipasi pemilih diantaranya adalah sebagai berikut:

- **Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out)**

Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa

angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu? Apa penyebabnya?

- **Perilaku memilih (Voting behaviour)**

Perilaku memilih adalah terkait dengan keputusan pemilih untuk memilih kandidat atau peserta pemilu tertentu. Kenapa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat atau peserta pemilu tertentu. Tentu beragam alasan yang dapat dikemukakan oleh setiap pemilih. persoalannya adalah, sejauhmana pilihan-pilihan itu bersifat rasional? Dengan kata lain, sejauhmana pilihan politik mereka berdasarkan pertimbangan rasional menyangkut kandidat atau peserta pemilu itu. Apakah rekam jejak, program atau janji peserta pemilu menjadi bahan pertimbangan atau faktor lain. Riset ini penting untuk mengetahui tingkat rasionalitas pemilih dalam pemilu.

- **Politik uang (Money politics/Vote buying)**

Politik biaya tinggi menjadi keluhan sebagian peserta pemilu. Salah satu penyebabnya adalah fenomena politik uang. Peserta pemilu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau pemilih aktif meminta imbalan dari dukungan yang diberikannya. Fenomena ini sudah pasti menjadikan demokrasi kita tidak sehat. Pertanyaannya, bagaimana politik uang terjadi? Polanya seperti apa? Kenapa disebagian tempat terjadi politik uang, disebagian tempat kebalikannya? Faktor apa yang mempengaruhi? Kebijakan apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi mengatasi fenomena politik uang?

- **Tingkat melek politik warga (Political literacy)**

Terdapat keyakinan bahwa tingkat melek politik warga berpengaruh pada sikap dan perilaku politik warga negara. Muaranya adalah pada tingkat kedewasaan perilaku berdemokrasi. Relasi itu bersifat perbandingan lurus, yaitu semakin tinggi tingkat melek politik warga semakin matang perilaku demokrasinya, dan sebaliknya. Dengan kata lain, wajah demokrasi sebuah negara sebagian ditentukan oleh tingkat melek politik warga. Pertanyaannya adalah seberapa tinggi/dalam melek politik warganegara? bagaimana melek politik warga selama ini terbentuk? faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga? Kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga?

- **Kesukarelaan Warga dalam politik (Political voluntarism)**

Kesukarelaan warga dalam politik berpengaruh luas dalam kehidupan politik. Absennya kesukarelaan warga dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Dalam jangka pendek, biaya politik mahal menjadi resiko yang harus ditanggung karena segalanya serba berbayar. Dalam jangka panjang, korupsi menjadi virus endemik yang pasti menyerang. Sebaliknya, tatanan demokrasi semakin kuat apabila kesukarelaan warga tumbuh dan hidup didalam masyarakat. Dari pemilu ke pemilu kesukarelaan warga mengalami pasang surut. Kesukarelaan warga yang kehadirannya ditandai dengan munculnya relawan dari berbagai kalangan kuat muncul dalam pemilu 2014. Pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi munculnya kesukarelaan politik warga dan faktor apa yang menghambatnya? Kebijakan apa saja yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan dan memperkuat kesukarelaan warga dalam politik?

Potensial tema riset lain dapat ditambahkan sepanjang berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu dan dikoordinasikan/disampaikan pilihan temanya dengan KPU pada struktur diatasnya.

D. Metode Riset

Metode riset dapat dipilih antara kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Metode kuantitatif berusaha mencari generalisasi atas masalah yang diteliti. Kerangka teori pada metode kuantitatif dimaksudkan untuk diuji kebenarannya sehingga hasil akhir dari penelitian adalah diterima atau ditolaknya sebuah teori/kerangka pemikiran dan dibangunnya kerangka pemikiran baru atas sebuah permasalahan.

Sementara itu pada metode kualitatif, penelitian dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian. Pada metode campuran, mengasosiasikan prosedur kerja pada metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan data kualitatif dan sebaliknya untuk dicapai satu analisis yang lebih komprehensif.

Dari berbagai pilihan metode riset tersebut, pilihan metode disesuaikan dengan kebutuhan dan fisibilitas berbagai hal yang menyangkut riset, dengan memperhatikan beberapa hal:

1. Sumber data

Sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, dsb. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, dokumentasi, data dari lembaga/institusi, dsb. Sumber data pada metode kuantitatif bersifat *random*, sedangkan pada kualitatif bersifat *purposive* atau *snowball*.

2. Pengumpulan data

Pada metode kuantitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui survey, wawancara, FGD, kuesioner, observasi, dsb. Pada metode kualitatif melalui *participant observation*, *in depth interview*, dokumentasi, maupun teknik triangulasi.

3. Pengolahan data

Bagaimana data diklasifikasikan atau dikumpulkan untuk kebutuhan membangun argumen, serta pemilahan data menurut relevansinya.

4. Analisis/Interpretasi data

Analisis data disesuaikan dengan pilihan metode riset yang digunakan. Pada metode kuantitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan statistic sedangkan pada kualitatif menginterpretasikan pola, model, atau pun teori yang digunakan.

E. Hasil

Secara umum, topik riset menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk (1) Laporan Hasil Riset, dan (2) Publikasi buku hasil riset. Secara khusus hasil akhir dari riset ini adalah dipetakannya akar persoalan atau peta masalah serta adanya rekomendasi atas persoalan dari setiap topik riset. Semua hasil akhir riset tersebut dibuat dalam bentuk *hard file* dan *soft file* baik format word maupun pdf, kemudian dikirimkan ke KPU, melalui alamat email : parmaskpuri@gmail.com

E. Pelaksanaan dan Pengorganisasian

Riset dapat dilaksanakan dengan cara swa-kelola atau dengan melibatkan pihak ketiga, baik perorangan/tim/lembaga yang mempunyai pengalaman pekerjaan dalam bidang riset.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab memastikan pelaksanaan riset dan hasilnya berjalan dengan baik. Berkaitan dengan itu maka setiap jenjang KPU dilakukan pembagian tugas sebagai berikut ini:

Tabel 1..

Tabel 1: Pembagian Peran KPU

PELAKSANA	TUGAS	
KPU	1.	Melaksanakan riset tingkat nasional
	2.	Melakukan supervisi pelaksanaan riset KPU/KIP Kab/Kota
	3.	Publikasi hasil riset di website KPU
	4.	Menyusun buku hasil riset
KPU PROVINSI	1.	Membagi tema riset untuk setiap KPU/KIP Kab/Kota dalam lingkup provinsi
	2.	Mengkoordinasikan dan mengumpulkan laporan pelaksanaan riset di KPU/KIP Kab/Kota dalam lingkup provinsi
	3.	Melaporkan rekap pelaksanaan kegiatan riset di KPU/KIP Kab/Kota dalam lingkup provinsi kepada KPU
KPU KAB/KOTA	1.	Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait tema riset
	2.	Melaksanakan riset tingkat kab/kota
	3.	Menyampaikan laporan pelaksanaan riset kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU*
	4.	Publikasi hasil riset di website KPU/KIP Kab/Kota

* KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan pelaksanaan riset kepada KPU melalui alamat email : parmaskpuri@gmail.com

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan riset pemilu di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada rentang waktu antara April s.d. Juli 2015.

Tabel 2: Waktu Pelaksanaan

No.	Agenda	KPU	KPU Kab/Kota
1.	Persiapan dan pelaksanaan Riset	Maret s.d. Juli 2015	April s.d. Juli 2015
2.	Publikasi hasil riset	Agustus s.d. November 2015	Agustus s.d. November 2015

G. Biaya

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan riset pemilu tertampung dalam anggaran riset pada DIPA Sekretariat Jenderal KPU untuk riset yang dilaksanakan oleh KPU dan DIPA Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk riset yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Riset yang dilaksanakan KPU menggunakan alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pemilih, "*Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada*", akun Belanja Jasa Lainnya, seperti tertuang dalam MAK 3364.032.001.011.522191, pada DIPA Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015.
- Riset yang dilaksanakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan alokasi anggaran Pendidikan Pemilih, "*Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*", akun Belanja Jasa Lainnya, seperti tertuang dalam MAK 3364.003.012.522191 pada DIPA Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015
- Riset dapat dilaksanakan dengan cara swa-kelola atau dengan melibatkan pihak ketiga, baik perorangan/tim/lembaga yang mempunyai pengalaman pekerjaan dalam bidang riset.

H. Penutup

Riset terkait partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan riset diharapkan dapat terlaksana dengan baik.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

Surabaya 15 Mei 2015

Nomor : 23 /UND/VI/2015
Sifat : Penting/ Segera
Lampiran : 1 (satu lembar)
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
di-
Jawa Timur

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Riset Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum akan diselenggarakan Rapat Koordinasi yang diadakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Mei 2015
Waktu/ Jam : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Tenggilis No. 1-3, Surabaya
Catatan : 1. Susunan acara sebagaimana terlampir;
2. Peserta rapat membawa Surat Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon agar saudara menugaskan 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidang Divisi Sosialisasi/ Pendidikan Pemilih pada acara tersebut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,


EKO SASMITO, SH. MH.

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta

SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI RISET
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM

HARI/TANGGAL	PUKUL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Kamis, 28 Mei 2015	09.30-10.00	Registrasi Peserta	PANITIA
	10.00-10.20	PEMBUKAAN	KETUA KPU PRC . JATIM
	10.20-12.00	MATERI : Sharing Knowledge Pendidikan Pemilih.	NARASUMBER : ANDRY DEWANTO HADIMAD, SH. Mantan Ketua/Anggota KPU PROVINSI JAWA TIMUR
		MODERATOR :	GOGOT CAHYO BASTO, S. SOS
	12.00-13.00	ISHOMA	PANITIA
	13.00-17.00	a. Pembagian Zona dan Tema Riset Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum; b. Focus Group Discossion (FGD) Desain Pendidikan Pemilih.	DIVISI SOSIALISASI
17.00	PENUTUP	PANITIA	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

Batu, 3 Agustus 2015

Nomor : 270/12/KPUKota-014.329951/VIII/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. Para Jurnalis

di
BATU

Menindaklanjuti Surat KPU Nomor 155/KPU/IV/2015, tertanggal 6 April 2015 Perihal pedoman riset tentang Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Batu telah melaksanakan Riset Partisipasi Masyarakat (Parmas) bekerja sama dengan Lembaga Survey dalam rangka mentradisikan perumusan kebijakan berbasis riset.

Agar pembahasan hasil survey tersebut mendapat masukan yang dapat memberi kontribusi positif dalam perbaikan manajemen pemilu, Kami mengharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/ Tanggal : Rabu / 5 Agustus 2015
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Hotel Riverstone Kota Batu
Acara : Diseminasi Hasil Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Kota Batu

Demikian untuk perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan Terima kasih.

KETUA,

ROCHANI, S.Pi, MP

Tembusan :

1. Kepada Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya (sebagai laporan)

**RUNDOWN ACARA DISEMINASI HASIL RISET DAN PEMETAAN
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
DI KOTA BATU**

di Hotel Riverstone Kota Batu, 5 Agustus 2015

KPU Kota Batu

ACARA	WAKTU (WIB)	PIC
1. Registrasi Peserta	09.00 s/d 09.30	Uke Wahyu Hidayati
2. Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	09.30 s/d 09.45	MC : Shanti Yushita Neneng Susanti
3. Sambutan	09.45 s/d 10.00	Ketua KPU : Rochani, S.Pi, MP
4. Penyampaian Hasil Survei : a. Pengantar Moderator b. Penyampaian Hasil Survey c. Tanggapan dan Masukan	10.00 s/d 12.30	Anggota KPU Divisi Sosialisasi : Saifudin Zuhri, S.Hi Lembaga Survei : Kualita Prima Indonesia
5. Doa dan Penutup	12.30 s/d 12.45	Badrut Tamam, SH

RAPAT PLENO KEGIATAN PARMAS KPU KOTA BATU BULAN MEI 2015



Pemaparan oleh Komisioner Divisi Sosialisasi dalam Rapat Pleno Parmas



Rapat Pleno juga dihadiri seluruh staf KPU Kota Batu

**DISEMINASI HASIL RISET TINGKAT PARTISIPASI
MASYARAKAT BERSAMA PIMPINAN PARPOL,
MEDIA MASSA, LEMBAGA SURVEY DAN KPU KOTA BATU**



Moderator mempersilahkan Surveyor memaparkan Hasil Survei



Beberapa peserta memberikan tanggapan dan saran setelah pemamparan

**DISEMINASI HASIL RISET TINGKAT PARTISIPASI
MASYARAKAT BERSAMA PIMPINAN PARPOL,
MEDIA MASSA, LEMBAGA SURVEY DAN KPU KOTA BATU**



**LIPUTAN MEDIA TELEVISI LOKAL KOTA BATU, “AGROPOLITAN
TELEVISI (atv)”**



PENGAMBILAN SAMPLE RISET TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT



Surveyor mengisi questioner sesuai jawaban yg diberikan Responden



Surveyor melakukan interview kepada Responden



KPU Kota Batu

Liputan Media Cetak

Nama Media	:	SURYA
Halaman	:	17
Hari	:	KAMIS
Tanggal	:	6 AGUSTUS 2015

SURYA

KAMIS, 6 AGUSTUS 2015

Warga Batu Tolak Politik Uang

Minat Warga Ikut Pemilu Menurun

BATU, SURYA - Mayoritas warga Kota Batu menolak adanya politik uang dalam pemilu, baik pemilu legislatif (Pileg), pemilu presiden (Pilpres), maupun pemilu kepala daerah (Pilkada). Sebagian besar mereka tak akan memilih calon yang membagi-bagikan uang kepada pemilih.

Demikian hasil riset dan survei PT Kualita Prima Indonesia (KPI), rekanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu dalam melaksanakan riset dan survei. Manajer PT Kualita Prima Indonesia (KPI), Afin Kusani menjelaskan, riset, dan survei yang dilakukannya menggunakan metode tatap muka dan interview. Ada sekitar 198 responden dengan kriteria warga asli Kota Batu yang telah berumur 17 tahun dan telah memiliki hak pilih yang tersebar di 24 desa dan kelurahan di Kota Batu. "Kami gunakan sampling multistage dalam melakukan riset dan pemetaan ini," kata Afin Kusani, Rabu (5/8).

Dari hasil riset dan survei yang dilakukannya pada Juni - Juli 2015, menurut Afin, dapat disimpulkan sekitar 87 persen responden menilai kualitas pelaksanaan pemilu sudah berjalan baik, meski ada 9,2 persen menyatakan kurang puas, dan sisanya tidak bersikap.

suryamalang.com
surabaya.tribunnews.com

KLIK

Bagaimana pendapat warga ?

Dalam konteks praktik politik uang dalam pemilu, papar Afin, 67 persen responden menyatakan tidak setuju dan 39 persen setuju. Yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni sekitar 88 persen responden menyatakan politik uang tidak diperlukan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pemilu.

Hal itu didukung data survei 24 persen responden menyatakan akan memilih calon anggota legislatif (caleg) atau calon kepala daerah yang membagikan uang dan sekitar 52 persen tidak akan memilih pembagi uang, serta 24 persen tidak bersikap.

"Yang penting lagi yakni 80 persen responden dalam survei setuju praktik politik uang dilarang dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada. Hanya 15 persen yang tidak setuju dilarang, dan sisanya tidak bersikap. Ini menunjukkan masyarakat menginginkan sebaiknya money politics dalam pemilu dihilangkan," ujar Afin.

Karena itu, ungkap Afin, pihaknya menyarankan perlunya pengawasan ketat

tentang praktik politik uang dengan membangun kerja sama, khususnya dengan perangkat desa dan kelurahan dalam mencegah lebih awal terjadinya money politics. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu dengan membuat aturan bersama, untuk memperkuat pengawasan dan mempermudah pemberian sanksi terhadap pelaku money politics.

"Kami rasa adanya money politics selain merusak sistem pemilu yang jujur dan adil juga telah membuat kepercayaan masyarakat pada pemilu menurun, sehingga partisipasi mereka berkurang," tutur Afin dalam paparan hasil riset dan survei pemilih di Kota Batu.

Riset dan survei itu dilakukan KPU Batu karena tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menurun. Karena itu, perlu antisipasi dengan melakukan survei pemetaan pemilih di masing-masing wilayah.

Ketua KPU Kota Batu, Rochani mengatakan, tugas pemetaan pemilih merupakan keputusan dan instruksi dari KPU Pusat. Dengan demikian dari survei pemetaan pemilih itu bisa diketahui apa penyebab terjadinya penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu. (aru)

suryamalang.com | suryamalang.tribunnews.com

BATU

17



KPU Kota Batu

Liputan Media Cetak

Nama Media	:	MALANG EKSPRES
Halaman	:	12
Hari	:	KAMIS
Tanggal	:	6 AGUSTUS 2015

Kamis, 6 Agustus 2015

12

Ngaji dan Ekspres

MALANG
EKSPRES

KPU Kota Batu



MUHAMMAD DHANI RAHMAN/MALANG EKSPRES

HASIL SURVEI: Ketua KPU Kota Batu, Rochani menyatakan jika money politic tidak manjur.

Money Politic Tidak Manjur

BATU - Hasil survei Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu bersama rekanan, mayoritas penerima politik uang justru tidak memilih dari calon legislatif (caleg) ataupun parpol yang telah memberinya uang politik.

Dari hasil survei yang diperoleh, sebanyak 88 persen dari penerima politik uang mengaku tidak memilih dari caleg yang telah memberinya uang. "Hanya 2 persen saja dari penerima politik uang yang memilih caleg ataupun parpol pemberi uang politik. Sedangkan sisanya mengaku tidak tahu alias tidak mau mengaku," ujar Kepala Divisi Sosialisasi KPU Batu, Syaifuddin Zuhri, Rabu (5/8).

Udin, panggilan akrab Syaifudin, mengatakan penggunaan politik uang tidak efisien untuk bisa mengangkat perolehan suara dari caleg, parpol, maupun calon kepala daerah. Namun juga tidak bisa dipungkiri banyak responden yang menerima sampai beberapa uang politik dari para caleg maupun parpol.

Hasil survei menunjukkan bahwa biaya politik tinggi yang telah dikeluarkan parpol tidak berbanding lurus dengan perolehan suara yang didapatkan. Ia mengatakan data tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan survei terhadap 198 responden di Kota Batu.

Dalam seminari hasil survei yang dilakukan kemarin, ada enam usulan yang ditawarkan untuk bisa menghapus politik uang. Dan tiga di antara yang memiliki dukungan tertinggi adalah peningkatan pengawasan, pemberian sanksi yang berat bagi pelaku politik uang, dan harus diadakan sosialisasi/edukasi pada calon pemilih.

Dari hasil survei ini direkomendasikan agar diberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya praktek politik uang. Adapun rekomendasi yang lain adalah pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktek politik uang di masyarakat, termasuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya. (muh/nda)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

JL. Raya Tlekung No. 212 Junrejo – Batu
Telp. (0341) 532030 Fax. (0341) 531866